



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG
NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN
KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka Sekretariat Jenderal telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman standar nomenklatur dan titelatur yang sesuai dengan susunan organisasi dan pembidangan kerja Komisi Yudisial serta organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, perlu dilakukan penyeragaman penggunaan nomenklatur dan titelatur dalam bahasa Inggris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Nomenklatur dan Titelatur Dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
 4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial;
 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Titelatur dalam bahasa Inggris di Lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Nomenklatur dan Titelatur dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman penggunaan nomenklatur dan titelatur dalam bahasa Inggris oleh Komisi Yudisial.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi



ARIE SUDIHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Pimpinan dan/atau Anggota Komisi Yudisial; dan
2. Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2024
TANGGAL 9 JULI 2024
TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR
DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN
KOMISI YUDISIAL

No.	NOMENKLATUR		TITELATUR
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	
1.	Ketua Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission</i>	<i>Chair of the Judicial Commission</i>
2.	Wakil Ketua Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission</i>	<i>Vice Chair of the Judicial Commission</i>
3.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Rekrutmen Hakim	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Judge Recruitment</i>
4.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Judge Oversight and Investigation</i>
5.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Judge Capacity Development and Misconduct Prevention</i>
6.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Human Resources, Advocacy, Legal, Research, and Development</i>
7.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Interagency Relations and Information Services</i>
8.	Sekretariat Jenderal	<i>Secretariat-General of the Judicial Commission</i>	<i>Secretary-General of the Judicial Commission</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



9.	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	<i>Bureau of Judge Recruitment, Advocacy, and Capacity Development</i>	<i>Head of Bureau of Judge Recruitment, Advocacy, and Capacity Development</i>
10.	Bagian Rekrutmen Hakim	<i>Division of Judge Recruitment</i>	<i>Head of Division of Judge Recruitment</i>
11.	Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	<i>Division of Judge Advocacy and Capacity Development</i>	<i>Head of Division of Judge Advocacy and Capacity Development</i>
12.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	<i>Bureau of Oversight of Judge Conduct</i>	<i>Head of Bureau of Oversight of Judge Conduct</i>
13.	Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat	<i>Division of Public Complaint Handling</i>	<i>Head of Division of Public Complaint Handling</i>
14.	Bagian Persidangan dan Pemeriksaan	<i>Division of Hearing and Examination</i>	<i>Head of Division of Hearing and Examination</i>
15.	Bagian Pemantauan Perilaku Hakim	<i>Division of Monitoring of Judge Conduct</i>	<i>Head of Division of Monitoring of Judge Conduct</i>
16.	Biro Investigasi	<i>Bureau of Investigation</i>	<i>Head of Bureau of Investigation</i>
17.	Bagian Analisis, Produksi, dan Dokumentasi	<i>Division of Investigation, Analysis, and Documentation</i>	<i>Head of Division of Investigation, Analysis, and Documentation</i>
18.	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak	<i>Division of Judge Investigation and Track Record</i>	<i>Head of Division of Judge Investigation and Track Record</i>
19.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	<i>Bureau of Planning and Internal Compliance</i>	<i>Head of Bureau of Planning and Internal Compliance</i>
20.	Bagian Perencanaan dan Hukum	<i>Division of Planning and Legal</i>	<i>Head of Division of Planning and Legal</i>
21.	Bagian Kepatuhan Internal	<i>Division of Internal Compliance</i>	<i>Head of Division of Internal Compliance</i>
22.	Subbagian Hukum dan Organisasi	<i>Sub-division of Legal and Organization</i>	<i>Head of Sub-division of Legal and Organization</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

23.	Biro Umum	<i>Bureau of General Affairs</i>	<i>Head of Bureau of General Affairs</i>
24.	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	<i>Division of Office Administration and Human Resources</i>	<i>Head of Division of Office Administration and Human Resources</i>
25.	Bagian Keuangan	<i>Division of Finance</i>	<i>Head of Division of Finance</i>
26.	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	<i>Division of Logistics and Housekeeping</i>	<i>Head of Division of Logistics and Housekeeping</i>
27.	Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	<i>Division of Liaison Office, Cooperation, and Interagency Relations</i>	<i>Head of Division of Liaison Office, Cooperation, and Interagency Relations</i>
28.	Subbagian Protokol	<i>Sub-division of Protocol</i>	<i>Head of Sub-division of Protocol</i>
29.	Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan	<i>Sub-division of Logistics and Procurement</i>	<i>Head of Sub-division of Logistics and Procurement</i>
30.	Subbagian Rumah Tangga	<i>Sub-division of Housekeeping</i>	<i>Head of Sub-division of Housekeeping</i>
31.	Subbagian Administrasi Penghubung	<i>Sub-division of Liaison Office Administration</i>	<i>Head of Sub-division of Liaison Office Administration</i>
32.	Subbagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	<i>Sub-division of Cooperation and Interagency Relations</i>	<i>Head of Sub-division of Cooperation and Interagency Relations</i>
33.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	<i>Center for Analysis and Information Services</i>	<i>Head of Center for Analysis and Information Services</i>
34.	Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	<i>Sector of Analysis and Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Head of Sector of Analysis and Judicial Governance Officer Development</i>
35.	Bidang Data dan Layanan Informasi	<i>Sector of Data and Information Services</i>	<i>Head of Sector of Data and Information Services</i>
36.	Sub-bidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Head of Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

37.	Kelompok Jabatan Fungsional	<i>Functional Position Group</i>	<i>Functional Officer</i>
38.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Junior Judicial Governance Officer</i>
39.	Penata Kehakiman Ahli Muda	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Senior Judicial Governance Officer</i>
40.	Penata Kehakiman Ahli Madya	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Associate Judicial Governance Officer</i>
41.	Penata Kehakiman Ahli Utama	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Executive Judicial Governance Officer</i>
42.	Tenaga Ahli	<i>Expert Consultant</i>	<i>Expert Consultant</i>
43.	Juru Bicara Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission Spokesperson</i>	<i>Judicial Commission Spokesperson</i>
44.	Penghubung Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission Liaison Office</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office</i>
45.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh (Penghubung Komisi Yudisial Aceh)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Nanggroe Aceh Darussalam (Penghubung Komisi Yudisial Aceh)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Nanggroe Aceh Darussalam (Penghubung Komisi Yudisial Aceh)</i>
46.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)	<i>Judicial Commission Liaison Office of North Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of North Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)</i>
47.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Barat)</i>
48.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau (Penghubung Komisi Yudisial Riau)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Riau (Penghubung Komisi Yudisial Riau)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Riau (Penghubung Komisi Yudisial Riau)</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

49.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan)	<i>Judicial Commission Liaison Office of South Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of South Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan)</i>
50.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung (Penghubung Komisi Yudisial Lampung)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Lampung (Penghubung Komisi Yudisial Lampung)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Lampung (Penghubung Komisi Yudisial Lampung)</i>
51.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Central Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Central Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)</i>
52.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur)	<i>Judicial Commission Liaison Office of East Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of East Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur)</i>
53.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali (Penghubung Komisi Yudisial Bali)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Bali (Penghubung Komisi Yudisial Bali)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Bali (Penghubung Komisi Yudisial Bali)</i>
54.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat)</i>
55.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur)	<i>Judicial Commission Liaison Office of East Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of East Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur)</i>
56.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan)	<i>Judicial Commission Liaison Office of South Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of South Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan)</i>

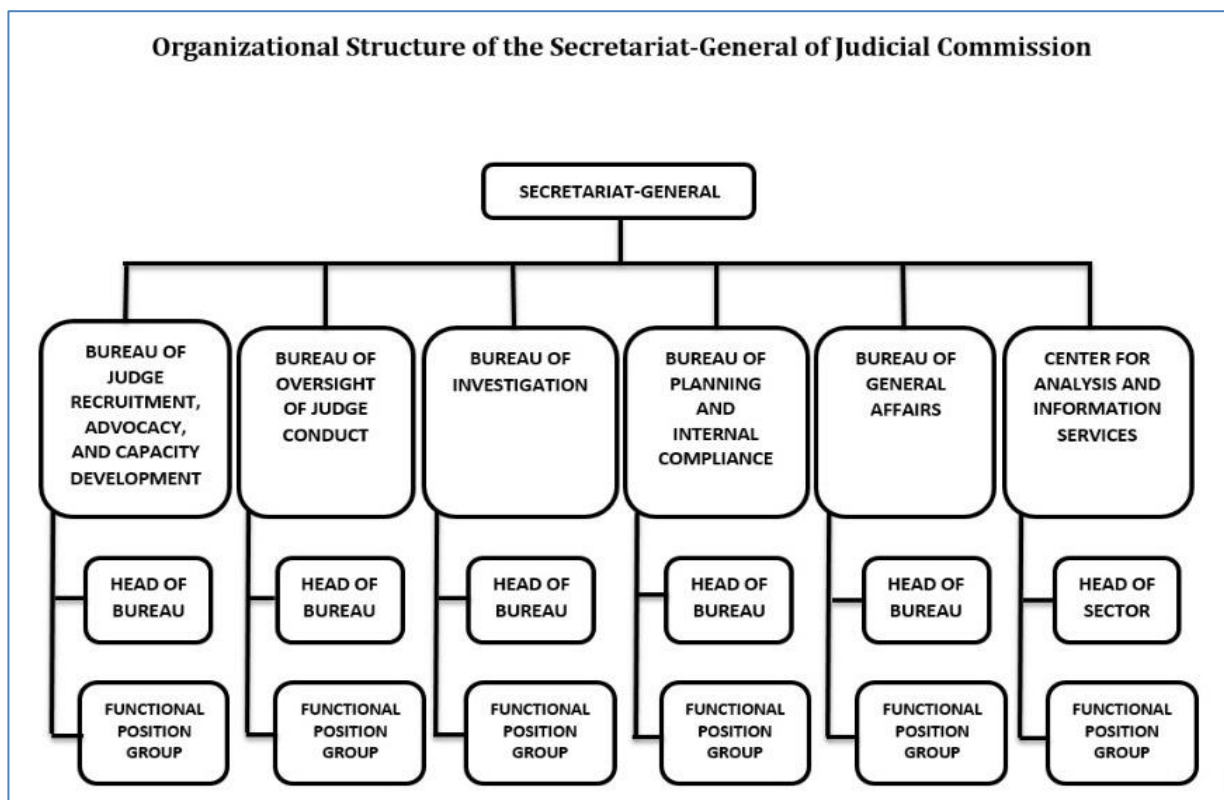
Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

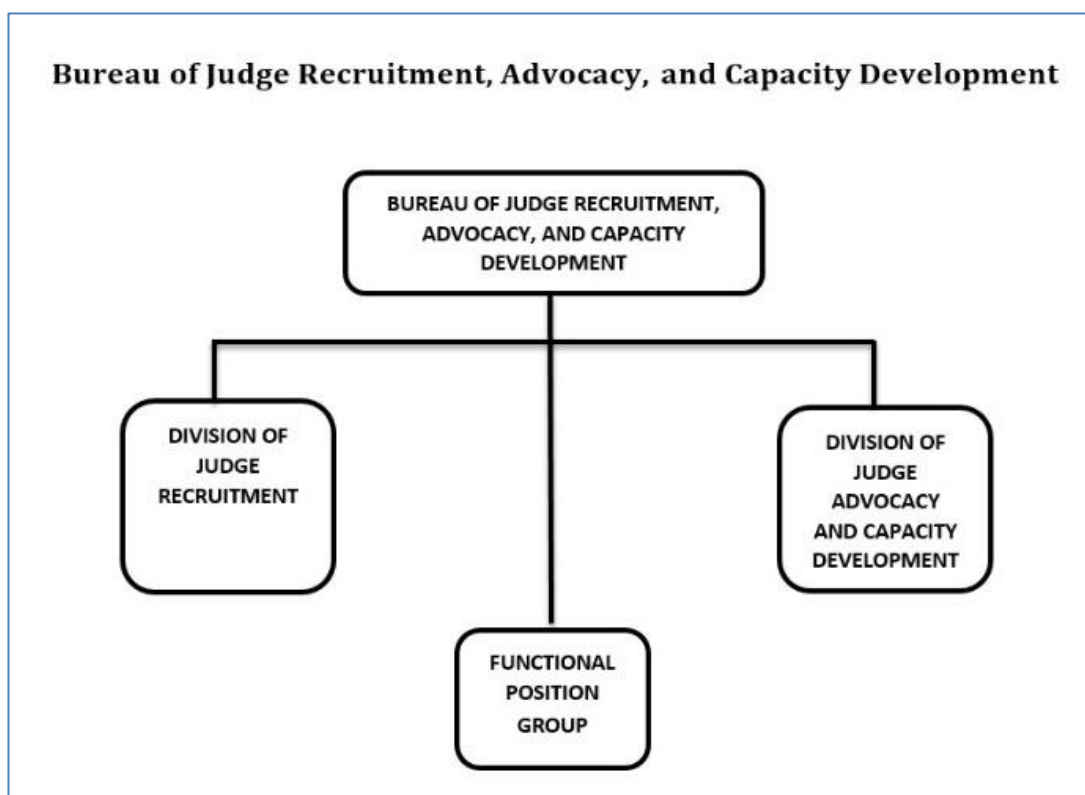
57.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur)	<i>Judicial Commission Liaison Office of East Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of East Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur)</i>
58.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat)</i>
59.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan)	<i>Judicial Commission Liaison Office of South Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of South Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan)</i>
60.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara)	<i>Judicial Commission Liaison Office of North Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of North Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara)</i>
61.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Tenggara)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Southeast Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Tenggara)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Southeast Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Tenggara)</i>
62.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku (Penghubung Komisi Yudisial Maluku)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Maluku (Penghubung Komisi Yudisial Maluku)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Maluku (Penghubung Komisi Yudisial Maluku)</i>
63.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua)</i>
64.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat (Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat)</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



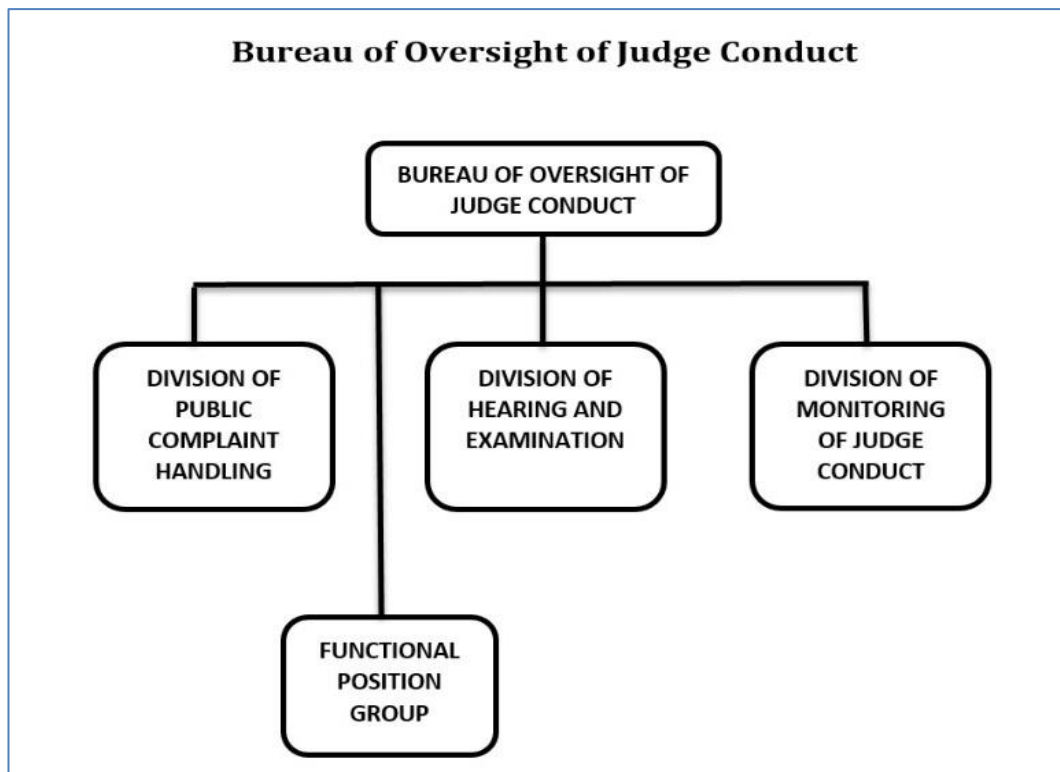
Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



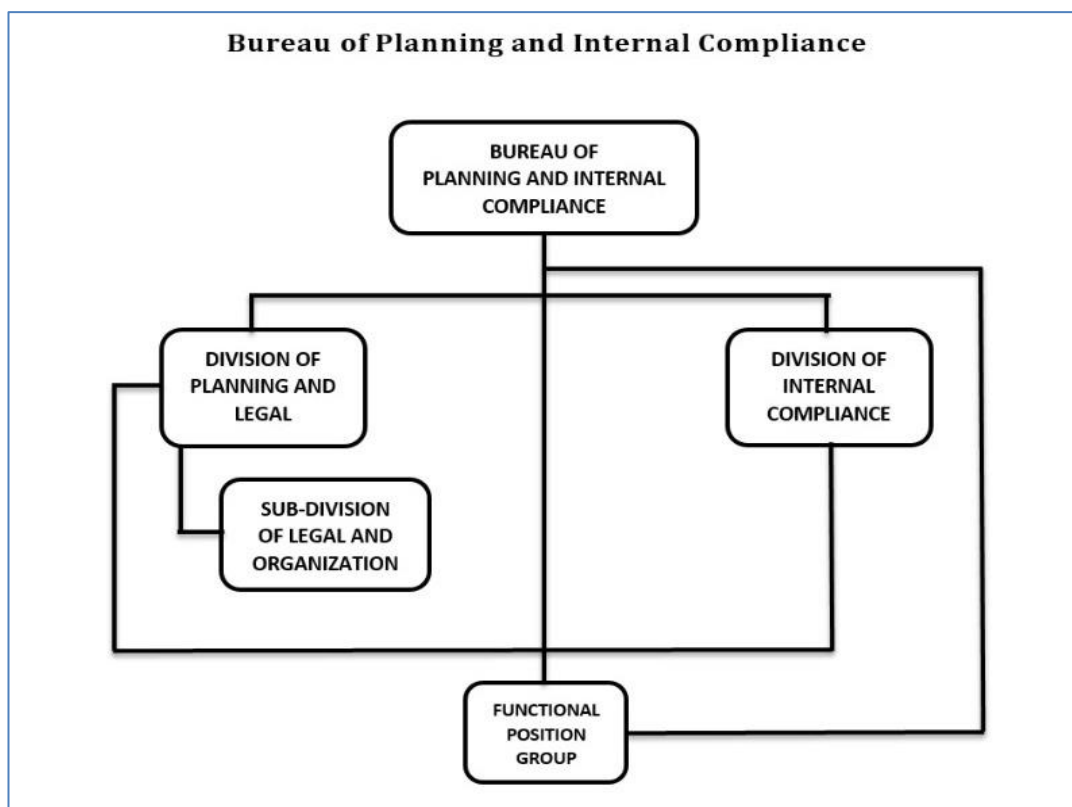
Bagan 2. Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



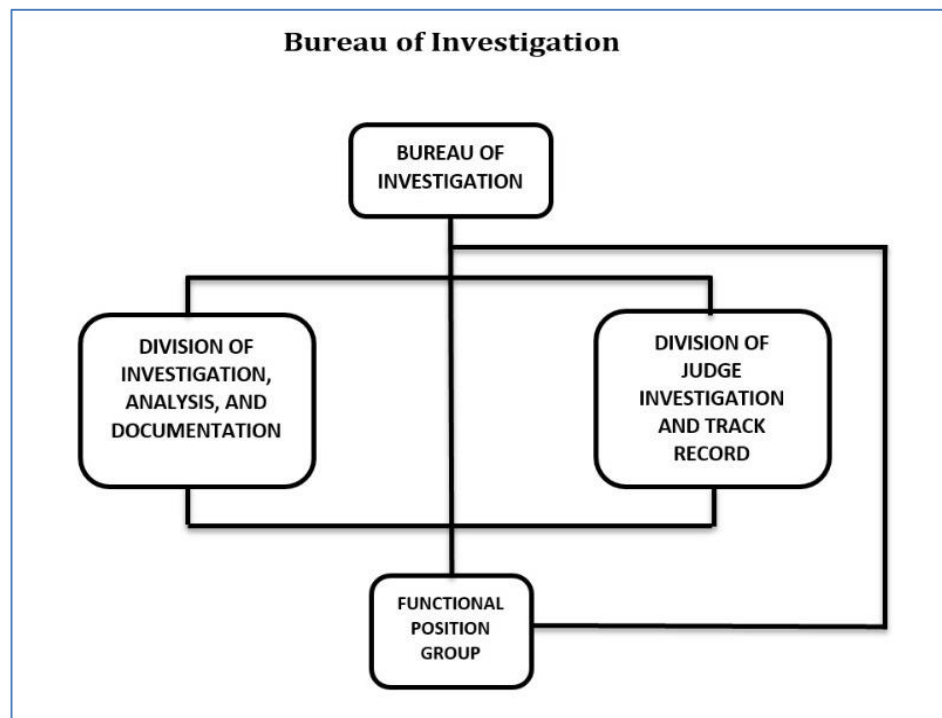
Bagan 3. Struktur Organisasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

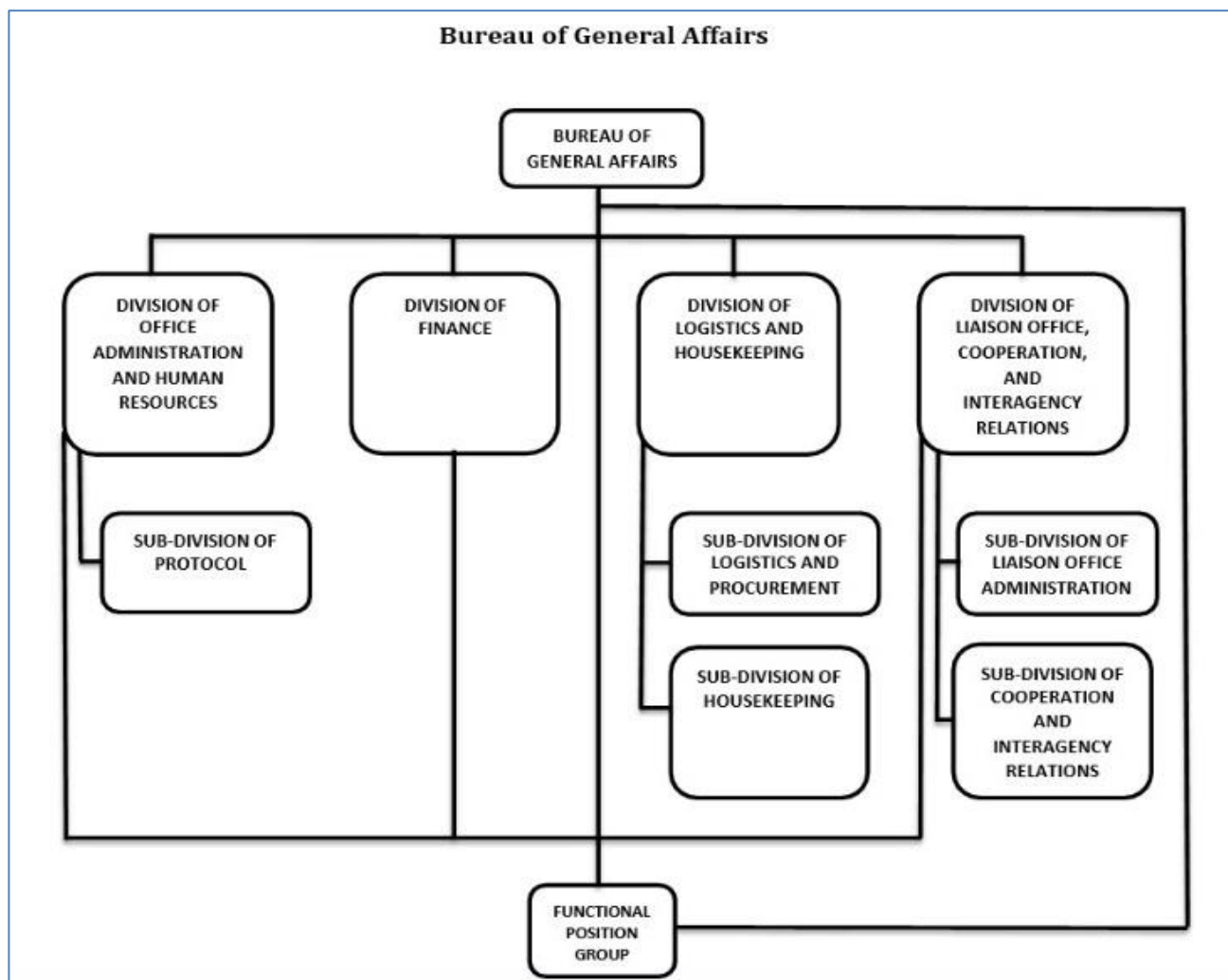
Bagan 4. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



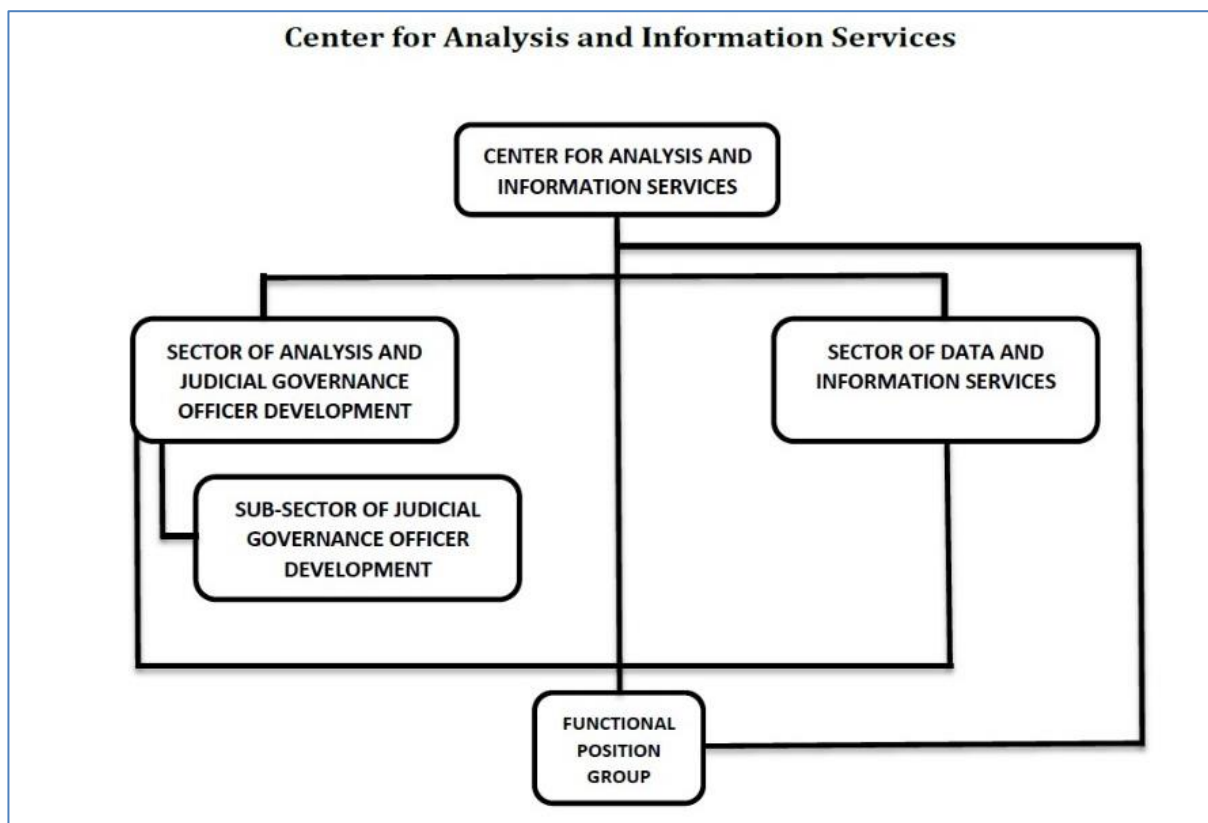
Bagan 5. Struktur Organisasi Biro Investigasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Bagan 6. Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



Bagan 7. Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SEKRETARIS JENDERAL,



✧ ARIE SUDIHAR 



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG
NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN
KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka Sekretariat Jenderal telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman standar nomenklatur dan titelatur yang sesuai dengan susunan organisasi dan pembidangan kerja Komisi Yudisial serta organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, perlu dilakukan penyeragaman penggunaan nomenklatur dan titelatur dalam bahasa Inggris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Nomenklatur dan Titelatur Dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
 4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial;
 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Titelatur dalam bahasa Inggris di Lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Nomenklatur dan Titelatur dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman penggunaan nomenklatur dan titelatur dalam bahasa Inggris oleh Komisi Yudisial.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2024
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Pimpinan dan/atau Anggota Komisi Yudisial; dan
2. Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2024
TANGGAL 9 JULI 2024
TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR
DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN
KOMISI YUDISIAL

No.	NOMENKLATUR		TITELATUR
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	
1.	Ketua Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission</i>	<i>Chair of the Judicial Commission</i>
2.	Wakil Ketua Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission</i>	<i>Vice Chair of the Judicial Commission</i>
3.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Rekrutmen Hakim	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Judge Recruitment</i>
4.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Judge Oversight and Investigation</i>
5.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Judge Capacity Development and Misconduct Prevention</i>
6.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Human Resources, Advocacy, Legal, Research, and Development</i>
7.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi	<i>Judicial Commission</i>	<i>Member of the Judicial Commission for Interagency Relations and Information Services</i>
8.	Sekretariat Jenderal	<i>Secretariat-General of the Judicial Commission</i>	<i>Secretary-General of the Judicial Commission</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



9.	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	<i>Bureau of Judge Recruitment, Advocacy, and Capacity Development</i>	<i>Head of Bureau of Judge Recruitment, Advocacy, and Capacity Development</i>
10.	Bagian Rekrutmen Hakim	<i>Division of Judge Recruitment</i>	<i>Head of Division of Judge Recruitment</i>
11.	Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	<i>Division of Judge Advocacy and Capacity Development</i>	<i>Head of Division of Judge Advocacy and Capacity Development</i>
12.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	<i>Bureau of Oversight of Judge Conduct</i>	<i>Head of Bureau of Oversight of Judge Conduct</i>
13.	Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat	<i>Division of Public Complaint Handling</i>	<i>Head of Division of Public Complaint Handling</i>
14.	Bagian Persidangan dan Pemeriksaan	<i>Division of Hearing and Examination</i>	<i>Head of Division of Hearing and Examination</i>
15.	Bagian Pemantauan Perilaku Hakim	<i>Division of Monitoring of Judge Conduct</i>	<i>Head of Division of Monitoring of Judge Conduct</i>
16.	Biro Investigasi	<i>Bureau of Investigation</i>	<i>Head of Bureau of Investigation</i>
17.	Bagian Analisis, Produksi, dan Dokumentasi	<i>Division of Investigation, Analysis, and Documentation</i>	<i>Head of Division of Investigation, Analysis, and Documentation</i>
18.	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak	<i>Division of Judge Investigation and Track Record</i>	<i>Head of Division of Judge Investigation and Track Record</i>
19.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	<i>Bureau of Planning and Internal Compliance</i>	<i>Head of Bureau of Planning and Internal Compliance</i>
20.	Bagian Perencanaan dan Hukum	<i>Division of Planning and Legal</i>	<i>Head of Division of Planning and Legal</i>
21.	Bagian Kepatuhan Internal	<i>Division of Internal Compliance</i>	<i>Head of Division of Internal Compliance</i>
22.	Subbagian Hukum dan Organisasi	<i>Sub-division of Legal and Organization</i>	<i>Head of Sub-division of Legal and Organization</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

23.	Biro Umum	<i>Bureau of General Affairs</i>	<i>Head of Bureau of General Affairs</i>
24.	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	<i>Division of Office Administration and Human Resources</i>	<i>Head of Division of Office Administration and Human Resources</i>
25.	Bagian Keuangan	<i>Division of Finance</i>	<i>Head of Division of Finance</i>
26.	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	<i>Division of Logistics and Housekeeping</i>	<i>Head of Division of Logistics and Housekeeping</i>
27.	Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	<i>Division of Liaison Office, Cooperation, and Interagency Relations</i>	<i>Head of Division of Liaison Office, Cooperation, and Interagency Relations</i>
28.	Subbagian Protokol	<i>Sub-division of Protocol</i>	<i>Head of Sub-division of Protocol</i>
29.	Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan	<i>Sub-division of Logistics and Procurement</i>	<i>Head of Sub-division of Logistics and Procurement</i>
30.	Subbagian Rumah Tangga	<i>Sub-division of Housekeeping</i>	<i>Head of Sub-division of Housekeeping</i>
31.	Subbagian Administrasi Penghubung	<i>Sub-division of Liaison Office Administration</i>	<i>Head of Sub-division of Liaison Office Administration</i>
32.	Subbagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	<i>Sub-division of Cooperation and Interagency Relations</i>	<i>Head of Sub-division of Cooperation and Interagency Relations</i>
33.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	<i>Center for Analysis and Information Services</i>	<i>Head of Center for Analysis and Information Services</i>
34.	Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	<i>Sector of Analysis and Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Head of Sector of Analysis and Judicial Governance Officer Development</i>
35.	Bidang Data dan Layanan Informasi	<i>Sector of Data and Information Services</i>	<i>Head of Sector of Data and Information Services</i>
36.	Sub-bidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Head of Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

37.	Kelompok Jabatan Fungsional	<i>Functional Position Group</i>	<i>Functional Officer</i>
38.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Junior Judicial Governance Officer</i>
39.	Penata Kehakiman Ahli Muda	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Senior Judicial Governance Officer</i>
40.	Penata Kehakiman Ahli Madya	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Associate Judicial Governance Officer</i>
41.	Penata Kehakiman Ahli Utama	<i>Sub-sector of Judicial Governance Officer Development</i>	<i>Executive Judicial Governance Officer</i>
42.	Tenaga Ahli	<i>Expert Consultant</i>	<i>Expert Consultant</i>
43.	Juru Bicara Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission Spokesperson</i>	<i>Judicial Commission Spokesperson</i>
44.	Penghubung Komisi Yudisial	<i>Judicial Commission Liaison Office</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office</i>
45.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh (Penghubung Komisi Yudisial Aceh)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Nanggroe Aceh Darussalam (Penghubung Komisi Yudisial Aceh)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Nanggroe Aceh Darussalam (Penghubung Komisi Yudisial Aceh)</i>
46.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)	<i>Judicial Commission Liaison Office of North Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of North Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)</i>
47.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Barat)</i>
48.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau (Penghubung Komisi Yudisial Riau)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Riau (Penghubung Komisi Yudisial Riau)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Riau (Penghubung Komisi Yudisial Riau)</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

49.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan)	<i>Judicial Commission Liaison Office of South Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of South Sumatra (Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan)</i>
50.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung (Penghubung Komisi Yudisial Lampung)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Lampung (Penghubung Komisi Yudisial Lampung)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Lampung (Penghubung Komisi Yudisial Lampung)</i>
51.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Central Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Central Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)</i>
52.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur)	<i>Judicial Commission Liaison Office of East Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of East Java (Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur)</i>
53.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali (Penghubung Komisi Yudisial Bali)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Bali (Penghubung Komisi Yudisial Bali)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Bali (Penghubung Komisi Yudisial Bali)</i>
54.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat)</i>
55.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur)	<i>Judicial Commission Liaison Office of East Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of East Nusa Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur)</i>
56.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan)	<i>Judicial Commission Liaison Office of South Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of South Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan)</i>

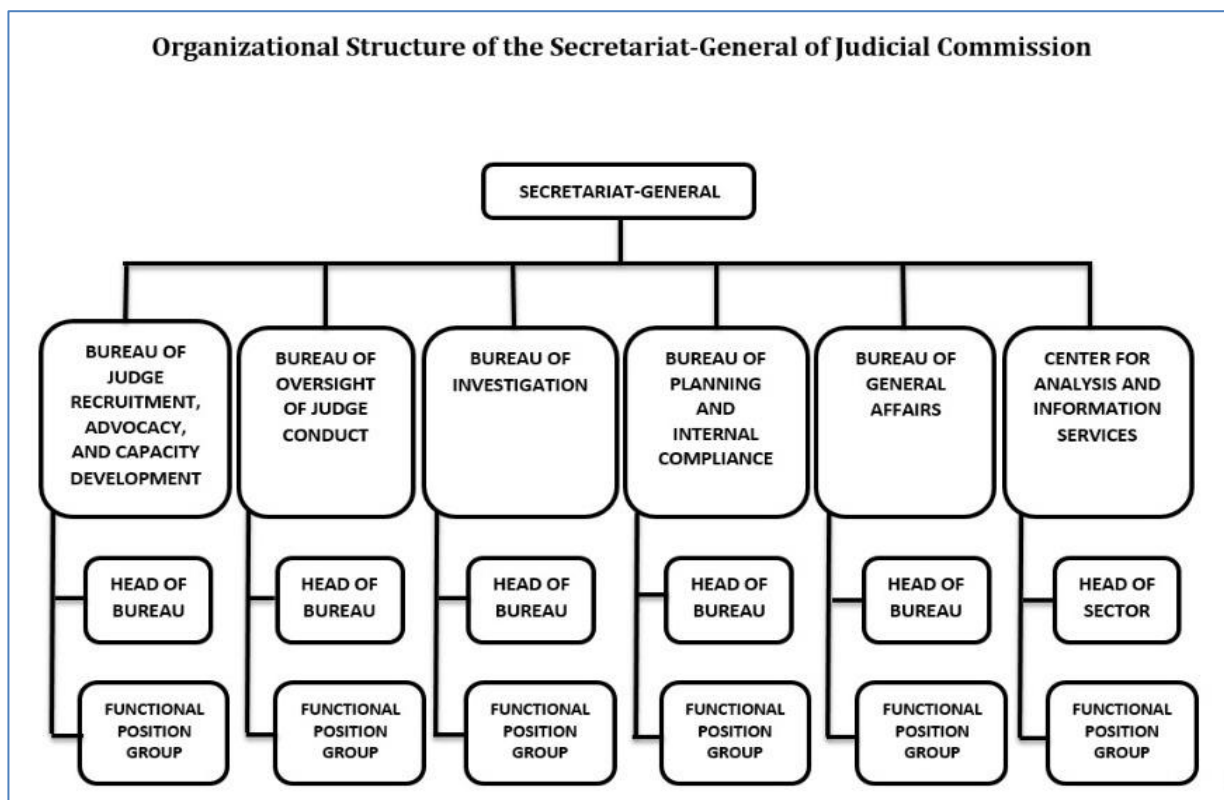
Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

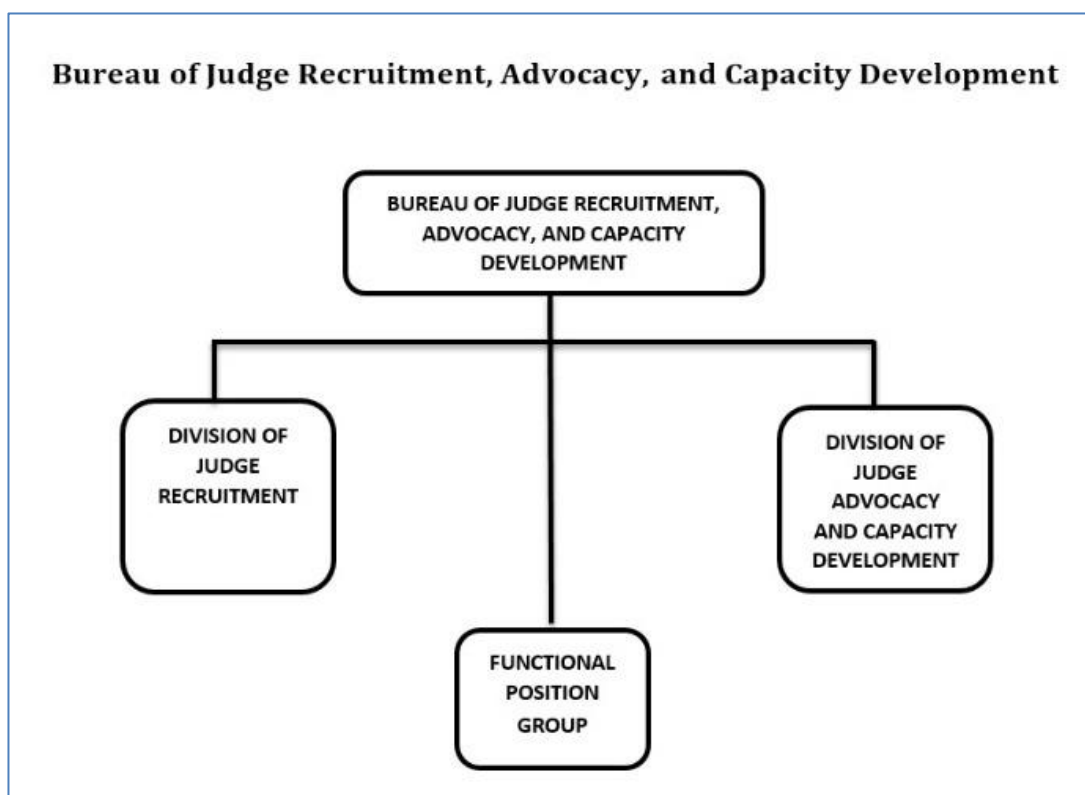
57.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur)	<i>Judicial Commission Liaison Office of East Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of East Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur)</i>
58.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Kalimantan (Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat)</i>
59.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan)	<i>Judicial Commission Liaison Office of South Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of South Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan)</i>
60.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara)	<i>Judicial Commission Liaison Office of North Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of North Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara)</i>
61.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Tenggara)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Southeast Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Tenggara)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Southeast Sulawesi (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Tenggara)</i>
62.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku (Penghubung Komisi Yudisial Maluku)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Maluku (Penghubung Komisi Yudisial Maluku)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Maluku (Penghubung Komisi Yudisial Maluku)</i>
63.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua)	<i>Judicial Commission Liaison Office of Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua)</i>
64.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat (Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat)	<i>Judicial Commission Liaison Office of West Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat)</i>	<i>Coordinator of Judicial Commission Liaison Office of West Papua (Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat)</i>

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



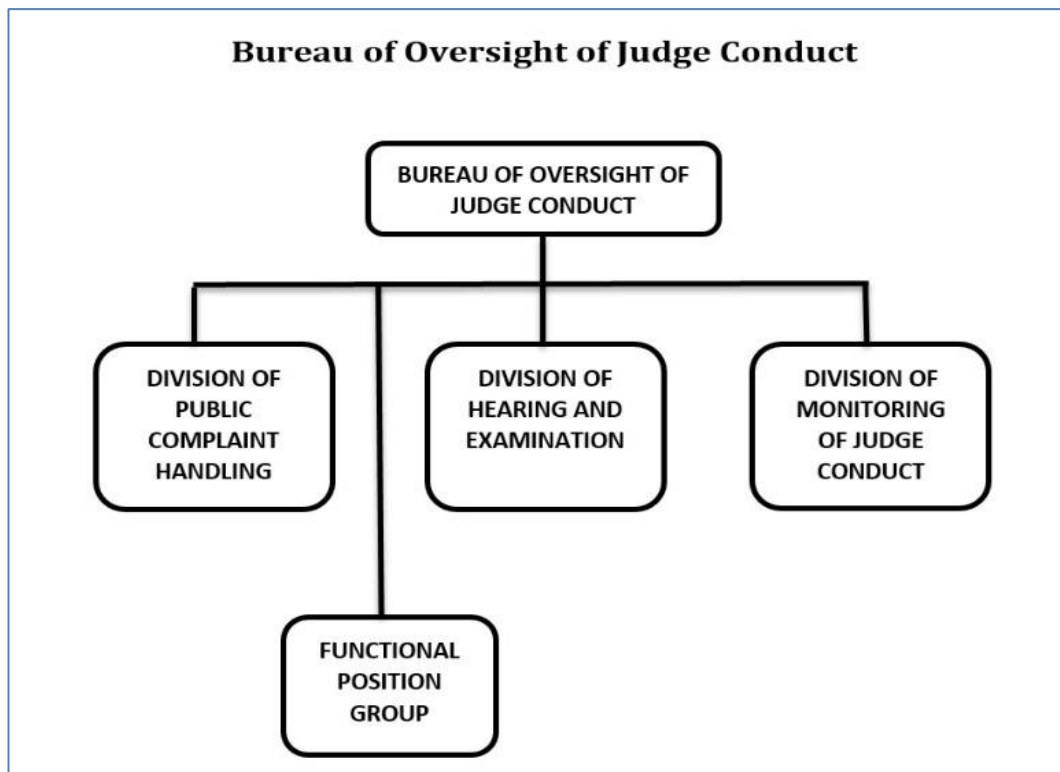
Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



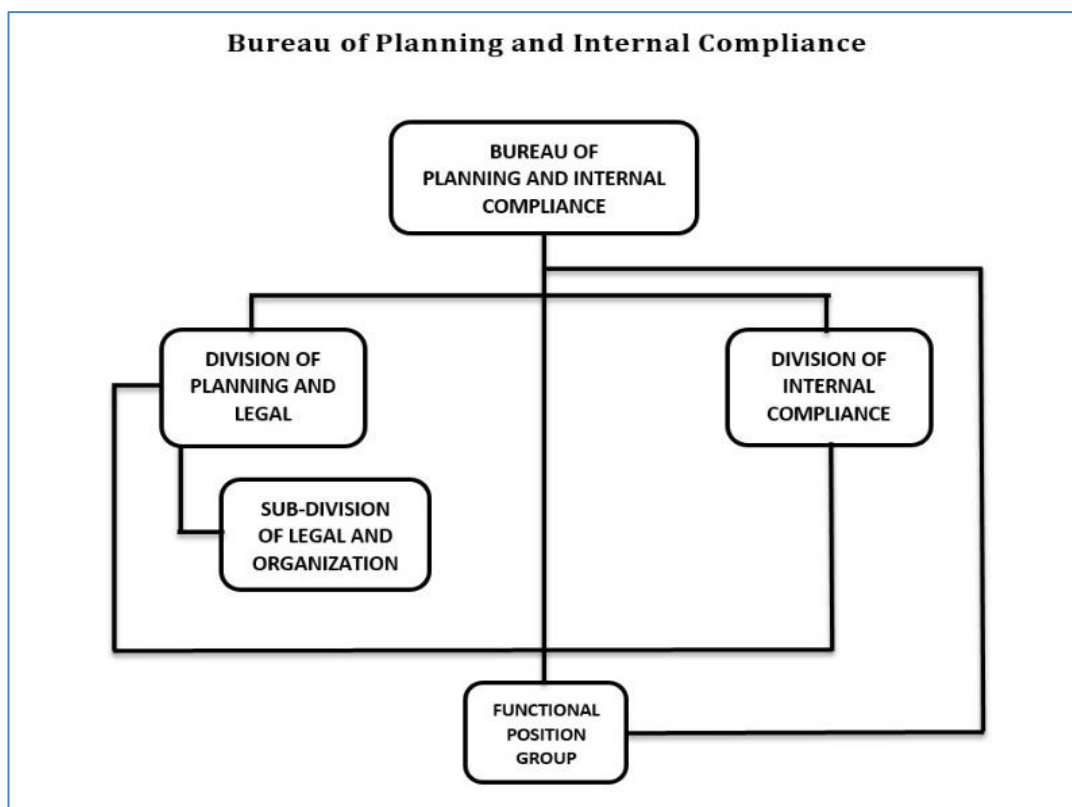
Bagan 2. Struktur Organisasi Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



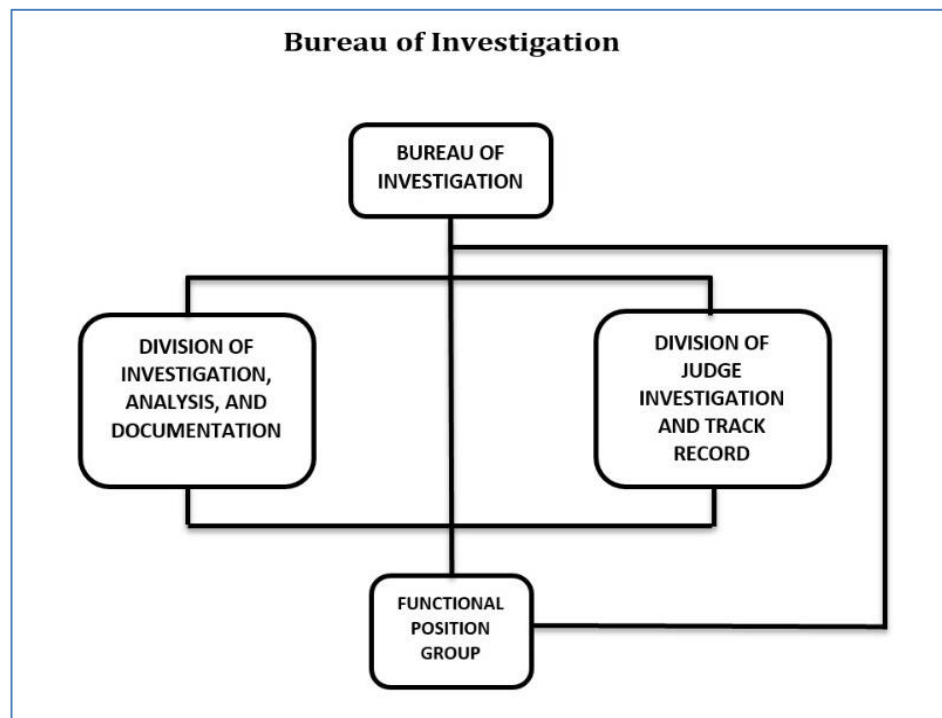
Bagan 3. Struktur Organisasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

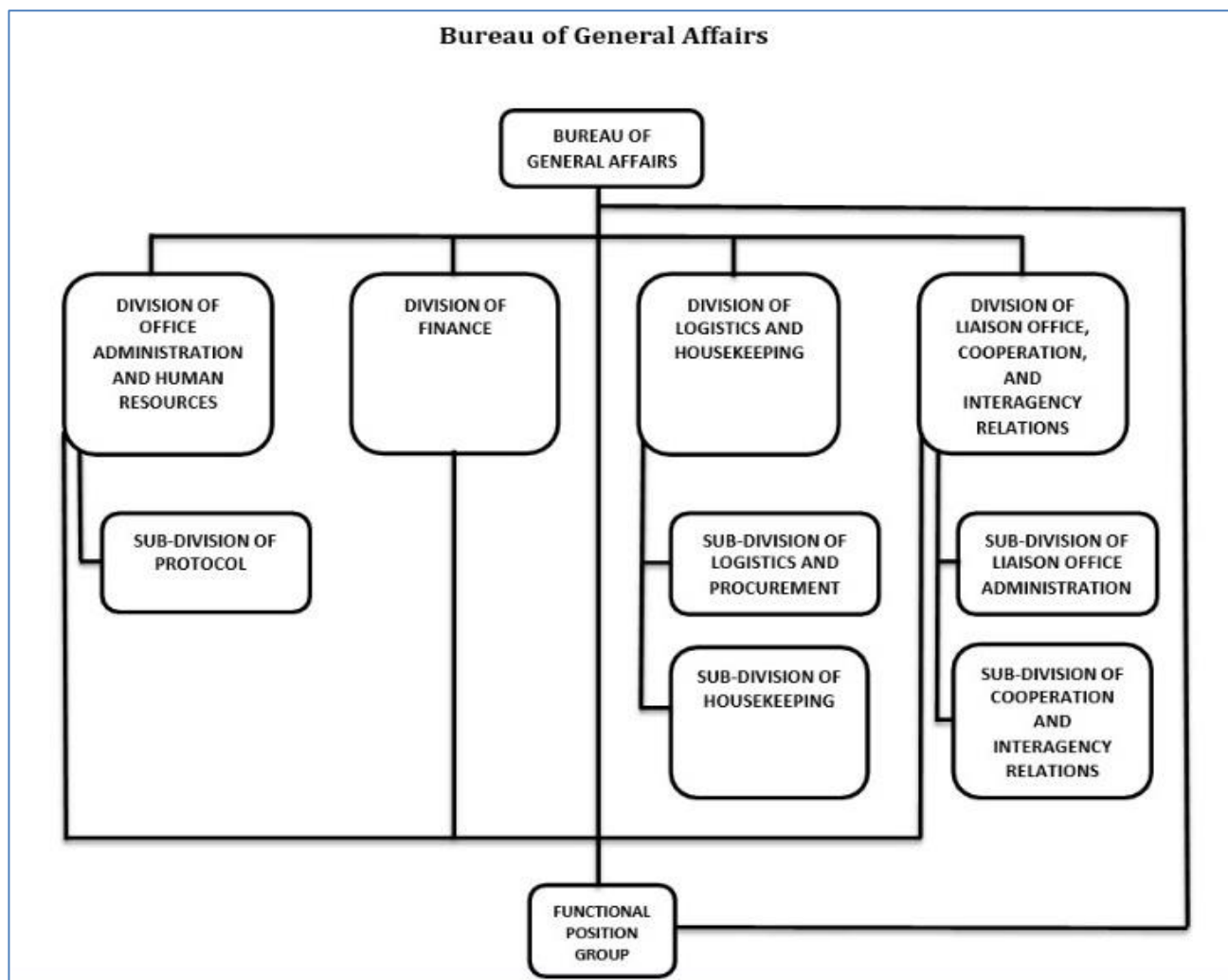
Bagan 4. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



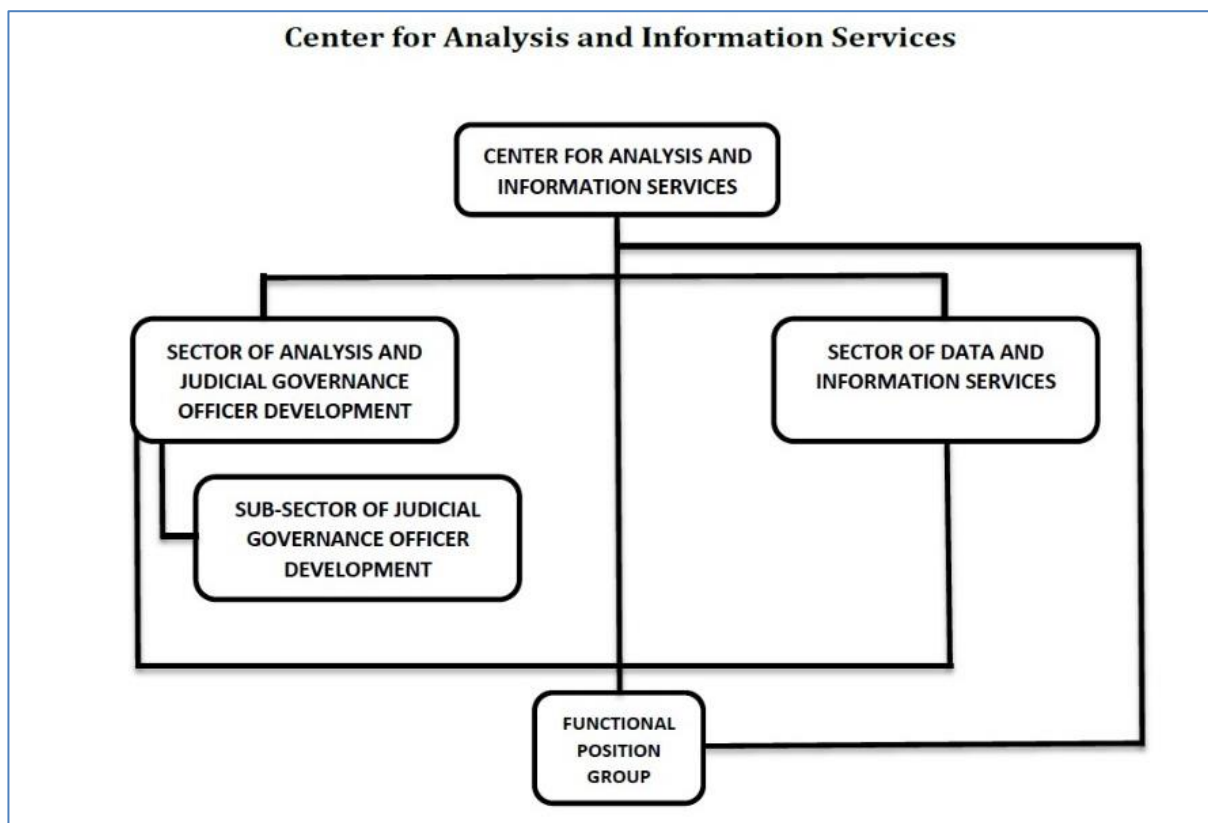
Bagan 5. Struktur Organisasi Biro Investigasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Bagan 6. Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



Bagan 7. Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.